

Hubungan Pendapatan dan Persepsi dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran pada Peserta Mandiri BPJS Kesehatan

Reika Zulkhaidah^{1*}, Syafrizal², Febriyanti Nursya³

^{1,2}Kesehatan Masyarakat, Universitas Alifah Padang

^{1*}reikazulkhaidah@gmail.com, ²tanur67.syafrizal@gmail.com, ³febriyantinursya9@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam membayar iuran berperan penting dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, tingkat kepatuhan masih rendah, termasuk di Wilayah tertentu dengan 30.111 peserta mandiri pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pendapatan dan persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional* ini dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025 dengan 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan cara wawancara dianalisis secara univariat serta bivariat menggunakan uji *chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan 53% peserta mandiri BPJS Kesehatan berpendapatan rendah untuk membayar iuran, 32% peserta mandiri memiliki persepsi negatif mengenai pembayaran iuran, 61% peserta mandiri tidak patuh dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat hubungan antara pendapatan ($p = 0,0001$) dan persepsi ($p = 0,0001$) dengan kepatuhan pembayaran iuran. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi pola bahwa ketidakpatuhan peserta mandiri tidak selalu dipengaruhi oleh faktor pendapatan, melainkan juga oleh persepsi terhadap pembayaran iuran dan kondisi tanggungan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dalam merancang strategi edukasi dan dukungan finansial agar peserta mandiri lebih patuh membayar iuran.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Kepatuhan, Pendapatan, Persepsi

Abstract

The compliance of independent participants of BPJS Kesehatan in paying contributions plays a crucial role in maintaining the sustainability of the National Health Insurance program. However, compliance remains low, including in areas with 30,111 independent participants in 2025. This study aims to determine the relationship between income and perception with the compliance of BPJS Kesehatan independent participants in paying contributions. This quantitative study used a cross-sectional design conducted from March to August 2025 with 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires through interviews and analyzed univariately and bivariately using the chi-square test. The results showed that 53% of participants had low income, 32% had negative perceptions of contribution payments, and 61% were non-compliant in paying BPJS Kesehatan contributions. Statistical analysis revealed a significant relationship between income ($p = 0.0001$) and perception ($p = 0.0001$) with contribution payment compliance. The novelty of this study lies in identifying that non-compliance among independent participants is not solely affected by income but also by perceptions of contribution payments and family dependents. These findings are expected to guide BPJS Kesehatan in developing educational strategies and financial support programs to improve contribution payment compliance among independent participants.

Keyword : BPJS Kesehatan, Compliance, Income, Perception

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No.24 Tahun 2011).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 30 November 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 277.859.856 jiwa. Segmentasi peserta tertinggi yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 41,4% atau 115.080.000 peserta. Peserta dari Pekerja Penerima Upah (PPU) Swasta tercatat sebesar 16,2%, dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 12,1% (BPJS Kesehatan, 2024).

Pemerintah pusat telah membayarkan iuran masyarakat kurang mampu (PBI) sekitar 96,7 juta peserta setiap tahunnya. Pemerintah daerah juga berkontribusi melalui bantuan iuran bagi 42,8 juta penduduk, sementara peserta PBPU kelas III masih menerima subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan (BPJS Kesehatan, 2024). Besaran iuran bagi peserta mandiri ditetapkan berdasarkan kelas dan kemampuan finansial individu. Ketepatan waktu pembayaran



CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program JKN, karena keterlambatan atau ketidakteraturan pembayaran dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan program. (BPJS Kesehatan, 2024).

Kepatuhan dalam membayar iuran didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang memiliki kemampuan dalam membayar iuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Jannah, 2022). Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain tingkat pendapatan dan persepsi mengenai pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Besaran pendapatan dapat menentukan kemampuan finansial peserta dalam melakukan pembayaran iuran secara teratur (Khumaira et al., 2024). Selain itu, persepsi mengenai pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran secara teratur (Rahman & Suryani, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dan persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. (Murniasih et al., 2022) menemukan bahwa pendapatan berhubungan dengan tingkat kepatuhan peserta BPJS mandiri. Penelitian (Rahman & Suryani, 2023) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap BPJS meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Hasil serupa dikemukakan (Hasan & Batara, 2020) yang menemukan terdapat hubungan persepsi dengan kepatuhan. (Khumaira et al., 2024) juga menyatakan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggota keluarga mempengaruhi kelancaran pembayaran iuran. Selain itu, (Jannah, 2022) menekankan bahwa pendapatan seseorang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dimilikinya. Namun, belum banyak penelitian di wilayah Sumatera Barat yang secara spesifik meneliti hubungan antara pendapatan dan persepsi dengan kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hal ini.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Padang pada bulan Mei 2024, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 93,22% atau sebanyak 5.315.166 jiwa. Sementara itu, di Kota Padang pada bulan Desember 2024, jumlah peserta mandiri tercatat sebesar 98,90% atau sebanyak 243.717 jiwa. Di Kecamatan Koto Tangah, jumlah tunggakan peserta mandiri mencapai 18,7 miliar per Desember 2024, dengan salah satu wilayah kerjanya memiliki jumlah peserta mandiri terbanyak yaitu sekitar 30.111 peserta dari total penduduk sebanyak 70.498 jiwa (BPJS Kesehatan, 2024).

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kondisi ekonomi dan persepsi peserta mandiri terhadap kewajiban pembayaran iuran. Kedua faktor tersebut berpotensi mempengaruhi keberlanjutan program JKN. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dan persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Penelitian dilaksanakan di salah satu wilayah kerja di Kota Padang yang memiliki jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan terbanyak, dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam serta tingkat tunggakan iuran yang relatif tinggi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret–Agustus 2025. Populasi penelitian sebanyak 30.111 peserta mandiri BPJS Kesehatan yang terdaftar di wilayah tersebut. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 responden dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi meliputi peserta mandiri BPJS Kesehatan di wilayah tersebut, serta peserta yang bertanggung jawab langsung dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kriteria eksklusi adalah peserta yang pernah menjadi responden survey awal. Variabel yang diteliti meliputi pendapatan, persepsi, dan kepatuhan pembayaran iuran. Definisi operasional dan cara pengukurannya dijelaskan pada Tabel 1. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang mengenai jumlah kepesertaan dan data tunggakan iuran. Data yang terkumpul diolah melalui tahap *editing*, *entry*, dan *cleaning* sebelum dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis dilakukan secara univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi tiap variabel dan bivariat dengan uji *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dan persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran. Penelitian ini juga telah memperoleh Surat Komite Etik Penelitian/Surat Layak Etik Universitas Alifah Padang sebagai upaya melindungi hak dan etika responden.

Tabel 1. Definisi Operasional

| No | Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur | Cara Ukur | Skala Ukur |
|----|--------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1 | Variabel Kepatuhan | Dependen Pembayaran iuran dilakukan oleh responden atau peserta setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu | Kuesioner | Wawancara | Ordinal |
| 2 | Variabel Independen Pendapatan | Penghasilan yang timbul dari aktivitas 3 responden setiap bulannya sesuai Standar Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 | Kuesioner | Wawancara | Ordinal |
| 3 | Persepsi | Persepsi masyarakat yang mempengaruhi keinginannya | Kuesioner | Wawancara | Ordinal |



untuk patuh dalam membayar
iuran BPJS Kesehatan secara
teratur

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

| Karakteristik Responden | Frekuensi (<i>f</i>) | Persentase (%) |
|--|------------------------|----------------|
| Umur | | |
| 20-29 Tahun | 15 | 15,0 |
| 30-39 Tahun | 28 | 28,0 |
| 40-49 Tahun | 32 | 32,0 |
| 50-59 Tahun | 22 | 22,0 |
| >60 Tahun | 3 | 3,0 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 68 | 68,0 |
| Perempuan | 32 | 32,0 |
| Anggota Keluarga yang Ditanggung BPJS | | |
| 1 Orang | 12 | 12,0 |
| 2 Orang | 25 | 25,0 |
| 3 Orang | 38 | 38,0 |
| 4 Orang | 14 | 14,0 |
| 5 Orang | 11 | 11,0 |
| Sarana Tempat Pembayaran | | |
| Teller Bank | 11 | 11,0 |
| ATM Bank | 28 | 28,0 |
| Agen Bank | 27 | 27,0 |
| Mobile Banking | 34 | 34,0 |
| Pendidikan | | |
| Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD | 2 | 2,0 |
| Tamat SD | 8 | 8,0 |
| Tamat SMP | 18 | 18,0 |
| Tamat SMA | 52 | 52,0 |
| Perguruan Tinggi D1/D3/S1/S2 | 20 | 20,0 |
| Pekerjaan | | |
| Buruh Harian | 10 | 10,0 |
| Pedagang/Wiraswasta | 66 | 66,0 |
| Nelayan | 10 | 10,0 |
| Petani | 14 | 14,0 |
| Total | 100 | 100,0 |

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 100 responden karakteristik umur yang paling banyak adalah kategori umur 40-49 tahun yaitu 32 orang (32%). Berdasarkan jenis kelamin ditemukan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 68 orang (68%). Berdasarkan anggota keluarga yang ditanggung BPJS didapatkan paling banyak responden menanggung 3 orang anggota keluarga yaitu 38 orang (38%). Berdasarkan sarana tempat pembayaran paling banyak yaitu menggunakan mobile banking sebanyak 34 orang (34%). Berdasarkan pendidikan paling banyak yaitu tamat SMA sebanyak 52 orang (52%). Adapun berdasarkan pekerjaan yang paling banyak adalah pedagang/wiraswasta sebanyak 66 orang (66%).

2. Analisis Univariat**a. Pendapatan****Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pendapatan Peserta Mandiri**

| Pendapatan | Frekuensi (<i>f</i>) | Persentase (%) |
|--------------|------------------------|----------------|
| Rendah | 53 | 53,0 |
| Tinggi | 47 | 47,0 |
| Total | 100 | 100,0 |

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa responden yang memiliki pendapatan rendah untuk membayar iuran mandiri BPJS Kesehatan yaitu 53 orang (53%).

b. Persepsi**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Persepsi Peserta Mandiri**

| Persepsi | Frekuensi (<i>f</i>) | Persentase (%) |
|--------------|------------------------|----------------|
| Negatif | 32 | 32,0 |
| Positif | 68 | 68,0 |
| Total | 100 | 100,0 |

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa responden yang memiliki persepsi negatif mengenai kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan yaitu 32 orang (32%).

c. Kepatuhan**Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Peserta Mandiri**

| Kepatuhan | Frekuensi (<i>f</i>) | Persentase (%) |
|--------------|------------------------|----------------|
| Tidak Patuh | 61 | 61,0 |
| Patuh | 39 | 39,0 |
| Total | 100 | 100,0 |

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa responden yang tidak patuh dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yaitu 61 orang (61%).

3. Analisis Bivariat**a. Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan****Tabel 6. Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan**

| Pendapatan | Kepatuhan | | Total | | <i>p</i> -value | |
|---------------|-------------|------|-----------|------|-----------------|--------|
| | Tidak Patuh | | Patuh | | | |
| | <i>f</i> | % | <i>f</i> | % | | |
| Rendah | 45 | 84,9 | 8 | 15,1 | 53 | 100,0 |
| Tinggi | 16 | 34,0 | 31 | 66,0 | 47 | 100,0 |
| Jumlah | 61 | | 39 | | 100 | 0,0001 |

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa proporsi responden yang menyatakan tidak patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan lebih banyak ditemukan pada responden yang memiliki pendapatan rendah yaitu 45 responden (84,9%), dibandingkan dengan responden yang memiliki pendapatan tinggi yaitu 16 responden (34%). Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p*-value = 0,0001 (*p* < 0,05) artinya, terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan.

b. Hubungan Persepsi dengan Kepatuhan**Tabel 7. Hubungan Persepsi dengan Kepatuhan**

| Persepsi | Kepatuhan | | | | Total | | <i>p-value</i> | |
|---------------|-------------|------|-----------|------|------------|-------|----------------|--|
| | Tidak Patuh | | Patuh | | <i>f</i> | % | | |
| | <i>f</i> | % | <i>f</i> | % | | | | |
| Negatif | 30 | 93,8 | 2 | 6,2 | 32 | 100,0 | | |
| Positif | 31 | 45,6 | 37 | 54,4 | 68 | 100,0 | 0,0001 | |
| Jumlah | 61 | | 39 | | 100 | | | |

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa proporsi responden yang menyatakan tidak patuh dalam membayar iuran mandiri BPJS Kesehatan pada responden yang memiliki persepsi negatif yaitu 30 responden (93,8%) dan responden yang memiliki persepsi positif yaitu 31 responden (45,6%). Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p-value* = 0,0001 ($p < 0,05$) artinya, terdapat hubungan antara persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan.

B. Pembahasan**1. Analisis Univariat****a. Pendapatan**

Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden didapatkan bahwa sebagian besar (53%) responden memiliki pendapatan kurang untuk membayar iuran. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Wulandari et al., 2020) di Kota Solok ditemukan hasil penelitian (50,5%) peserta mandiri BPJS Kesehatan berpendapatan rendah tidak patuh dalam membayar iuran. Menurut Surato (2019) pendapatan merupakan hasil yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan besarnya kemampuan, keterampilan, dan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pendapatan dapat disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah. Peserta dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dibandingkan dengan kewajiban membayar iuran JKN. (Aisah, 2022). Pendapatan responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan Standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2025, yaitu sebesar Rp2.994.193 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan finansial menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan dalam membayar iuran.

b. Persepsi

Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden didapatkan bahwa (32%) responden memiliki persepsi negatif mengenai kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Latifah et al., 2020) ditemukan hasil penelitian (42,2%) peserta mandiri BPJS Kesehatan dengan persepsi negatif tidak patuh dalam membayar iuran. Persepsi terbentuk dari informasi awal yang diterima oleh peserta (Yani, 2023).

Sesuai dengan penelitian (Apriliani dan Rahardjo, 2021) persepsi terbentuk melalui pengalaman pribadi maupun informasi yang diperoleh dari orang-orang terdekat terkait besaran iuran serta perbedaan pelayanan yang diterima antara pasien umum dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fenomena tersebut dapat mempengaruhi sikap dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan, serta menimbulkan persepsi mengenai aspek keadilan dalam akses terhadap layanan medis.

c. Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 responden didapatkan sebanyak (61%) responden tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Utami et al., 2024) di Kabupaten Mesuji ditemukan hasil penelitian (75,5%) menunjukkan tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran. Menurut Notoatmodjo (2014) Kepatuhan merupakan sikap taat, patuh, dan tunduk terhadap aturan, ajaran, atau ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan dalam membayar iuran merupakan perilaku seseorang yang menunjukkan kemauan untuk membayar iuran tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini meliputi kesesuaian waktu pembayaran, jumlah iuran, serta keteraturan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, kepatuhan secara umum diartikan sebagai ketatahan atau ketidaktakutan terhadap perintah maupun aturan yang berlaku (Jannah, 2022). Kepatuhan peserta dengan persepsi negatif dapat berpengaruh terhadap rendahnya konsistensi dalam pembayaran iuran.



2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi peserta yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran lebih banyak ditemukan pada responden berpendapatan rendah yaitu 45 responden (84,9%) dibandingkan dengan responden berpendapatan tinggi yaitu 16 responden (34%). Hasil uji statistik didapatkan nilai p - value 0,0001 ($p < 0,05$) artinya terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Sesuai dengan penelitian (Latifah, Nabila, & Fajirini, 2020) semakin tinggi pendapatan maka akan semakin sadar seseorang untuk mengikuti asuransi dan teratur dalam membayar iuran.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar peserta memiliki pendapatan di bawah UMP Sumatera Barat dengan beban finansial banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, sehingga terhambatnya kemampuan peserta dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, terdapat pula peserta dengan pendapatan tinggi tetapi tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena peserta jarang memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Prosedur persyaratan pelayanan yang dinilai memerlukan waktu membuat peserta lebih memilih berobat ke fasilitas lain tanpa menggunakan BPJS, sehingga kepatuhan dalam membayar iuran menjadi rendah.

Maka dari itu, disarankan agar peserta dengan pendapatan di bawah UMP dapat dipertimbangkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara itu, untuk peserta berpendapatan tinggi, penyederhanaan prosedur pelayanan dapat meningkatkan kepuasan dan mendorong kepatuhan dalam pembayaran iuran secara rutin.

b. Hubungan Persepsi dengan Kepatuhan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi peserta yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran pada responden yang memiliki persepsi negatif yaitu 30 responden (93,8%) dan responden yang memiliki persepsi positif yaitu 31 responden (45,6%). Hasil uji statistik didapatkan nilai p - value 0,0001 ($p < 0,05$) artinya terdapat hubungan antara persepsi dengan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS. Penelitian ini sejalan dengan Mentari (2024) yang menyatakan bahwa persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar iuran program JKN (Mentari, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta dengan persepsi negatif terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan cenderung tidak patuh dalam melakukan pembayaran, karena pendapatan yang terbatas dan beban iuran untuk seluruh anggota keluarga, sehingga menurunkan motivasi peserta untuk membayarnya secara rutin. Namun, terdapat pula peserta dengan persepsi positif mengenai kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan tetapi tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak. Meskipun memiliki keinginan untuk membayar, kondisi finansial yang tidak memadai membuat peserta kesulitan menjangkau besaran iuran yang ditetapkan.

Maka dari itu, diperlukannya perbaikan prosedur persyaratan pelayanan dan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta kesadaran peserta dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin dan tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (53%) peserta mandiri BPJS Kesehatan memiliki pendapatan rendah, (32%) memiliki persepsi negatif terhadap kewajiban pembayaran iuran, dan (61%) tidak patuh membayar iuran. Hasil Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dan kepatuhan (p -value = 0,0001), serta antara persepsi dan kepatuhan (p -value = 0,0001). Dengan demikian, dapat disimpulkan pendapatan dan persepsi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi bagi BPJS Kesehatan dalam merancang strategi edukasi dan dukungan finansial, termasuk memberikan informasi yang lebih jelas dan pendekatan yang mudah dipahami peserta, sehingga kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, S. A. S. (2022). Hubungan Antara Persepsi, Pendapatan, Dan Jarak Tempuh Menuju Tempat Pembayaran Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di RS X Kab Bogor Tahun 2021. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health Science*, 1(08), 268–276.





Apriliani, S., & Rahardjo, B. B. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(3), 713–721.

BPJS Kesehatan. (2024). *Data Peserta BPJS Kesehatan*. Kota Padang.

BPJS Kesehatan. (2024). Info BPJS Kesehatan - Edisi ke 123. Retrieved from <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/#/informasi-publik-detail?slug=info-bpjs-kesehatan-edisi-ke-123>

BPJS Kesehatan. (2024). *Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan*. Retrieved from <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/#/>

Hasan, N., & Batara, A. S. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Tamamaung Kota Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 382–393.

Jannah, M. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula. *Window of Public Health Journal*, 3(2), 250–259.

Khumaira, L., Herawati, P., Auzi, S., & Gurning, F. P. (2024). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan ATP dan WTP Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran BPJS Kelas III pada pedagang di Kelurahan Tuntungan II. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 7(2), 85–95.

Latifah, N., Nabila, W., & Fajrini, F. (2020). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16(2), 84–92.

Mauliyah, N. I., & Masrunik, E. (2019). *Dasar Akuntansi*. Penerbit NEM.

Mentari, W. D. (2024). *Kajian Sistem Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kemampuan dan Kemauan Membayar*. Penerbit NEM.

Murniasih, M., Suparman, R., Mamlukah, M., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022. *Journal of Public Health Innovation*, 3(01), 41–51.

Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pemerintah RI. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 tentang Badang Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rahman, F., & Suryani, L. (2023). Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 443–454.

Utami, N. J., Karyus, A., & Pramudho, K. (2024). Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. *JIK JURNAL ILMU KESEHATAN*, 8(1), 10–20.

Yani, H. V. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bulanan BPJS Kesehatan Peserta Mandiri pada Sektor Informal di Kota Jambi*. Universitas Jambi.

